

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap KEH dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dimulai dari adanya pengaduan/laporan dari pihak korban yaitu MQ kemudian tahap penyelidikan untuk menggolongkan apakah ada unsur pidana didalam laporan MQ dan mengumpulkan bukti permulaan. Proses selanjutnya yaitu penyidikan yang mencakup peneluran Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP, pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi korban, pemanggilan saksi terlapor, pemanggilan para saksi, gelar perkara, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, penyitaan dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terdapat pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam hal penerbitan SPDP yang tidak dikirimkan kepada KEH sebagai pihak yang terlapor telah mengakibatkan cacat prosedural karena melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015.

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu penentuan tempat terjadinya perkara pidana, lokasi tersangka yang jauh, banyaknya biaya yang dikeluarkan dan keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Yogyakarta untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik perlu lebih memperhatikan dan taat akan prosedur penyidikan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar tidak terjadi adanya cacat prosedural dalam proses penyidikan.
2. Penyidik perlu meningkatkan kredibilitasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia agar tercipta kondisi dimana masyarakat dapat percaya bahwa haknya atas perlindungan hukum akan terjamin.
3. Penyidik perlu meningkatkan koordinasi, kerjasama dan menjalin hubungan yang lebih intensif antar lembaga bank maupun kerjasama dengan operator seluler guna upaya penanganan tindak pidana

menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

4. Pendidik perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan berperan aktif membina masyarakat agar kejahatan seperti tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ini dapat dicegah lebih awal.

